

EDISI SELASA / 07 April 2020

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

#kerendirumah

ORANG TANPA GEJALA, BAHAYA LATEN PENYEBARAN CORONA

Badan Intelijen Negara (BIN) memprediksi puncak wabah corona di Indonesia terjadi pada bulan Mei dengan jumlah kasus positif sekitar 95.451 orang. Pemerintah pun kembali menekankan penggunaan masker bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Sebab, bahaya laten pasien positif Covid-19 tidak bergejala alias Orang Tanpa Gejala (OTG) makin menghantui.

Baca hal 11



KEMENTERIAN & LEMBAGA YANG **DIPANGKAS** ANGGARANNYA

K/L	SEMULA	SEKARANG
Kementerian Pertahanan	Rp 131 triliun	Rp 121 triliun
Kementerian Pertanian	Rp 21 triliun	Rp 17 triliun
Kementerian Perhubungan	Rp 43 triliun	Rp 36 triliun
Kemen PUPR	Rp 120 triliun	Rp 95 triliun
Kemenriset dan Teknologi	Rp 42 triliun	Rp 2 triliun
Kemensos	Rp 62 triliun	Rp 60 triliun
Kejaksaan Agung	Rp 7 triliun	Rp 6 triliun
Mahkamah Agung	Rp 10,5 triliun	Rp 10,1 triliun
Polri	Rp 104 triliun	Rp 96 triliun
Mahkamah Konstitusi	Rp 246 miliar	Rp 221 miliar

KEMENTERIAN YANG MENDAPAT **KENAIKAN** ANGGARAN

K/L	SEMULA	SEKARANG
Kemendikbud	Rp 36 triliun	Rp 70 T
Kemenkes	Rp 57 triliun	Rp 76 T

PERKEMBANGAN **VIRUS CORONA**

	Kasus Positif	Meninggal Dunia	Sembuh
INDONESIA	2.491	209	192
SELURUH DUNIA	1.276.302	69.527	264.048

Update : 06 April 2020 Pukul 15.30 WIB
Source : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins



Pemkot Surabaya pasang alat semprot disinfektan di bawah JPO

Surabaya- Meski jumlah kasus positif virus corona di Jawa Timur terbanyak berada di kota Surabaya, tapi Pemkot belum mengajukan permohonan persetujuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Pahlawan. Walaupun demikian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya mengaku sedang menyiapkan semua kajian dan hal-hal yang dibutuhkan bila aturan tersebut ditetapkan.

"Saat ini kita masih terus berdiskusi dengan instansi terkait kajian dan analisa dampak dari penerapan PSBB tersebut. Setelah kajian dan analisa dilakukan, maka itu kemudian dilaporkan dahulu kepada wali kota (Tri Rismaharini)," kata Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M. Fikser di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Senin (06/04). PSBB sendiri telah diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020.

Selanjutnya, kata Fikser, ada prosedur yang harus diikuti. Pasca kajian selesai, walikota akan membuat surat pengajuan

PEMKOT SURABAYA BELUM AJUKAN PSBB

ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebelum kemudian diserahkan ke Pemerintah Pusat.

"Tidak mungkin pemkot langsung kirim surat ke Pemerintah Pusat, karena kan harus melalui tahapan ke provinsi dahulu. Nah, jika di provinsi sendiri belum ada surat pengajuan itu, otomatis PSBB ini belum diterapkan," katanya.

Fikser menjelaskan, bila mau menerapkan PSBB, dampak yang ditimbulkan dari adanya aturan itu juga harus dipikirkan. Mulai dari dampak ekonomi hingga sosial kemasyarakatan. "Jadi hingga saat ini pemkot masih melakukan kajian-kajian dan belum menerapkan itu. Hanya sebatas memberikan imbauan-imbauan di lapangan kepada masyarakat," jelasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya ini juga mengungkapkan untuk pencegahan, Pemkot bersama instansi terkait sudah melakukan penyemprotan bagi kendaraan di 19 pintu masuk ke Kota Surabaya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

Pemkot Surabaya juga berharap masyarakat tidak melakukan penutupan jalan secara sepihak. Hal ini lantaran perlu diskusi, kajian dan pola sehingga ketidaknyamanan dapat diminimalkan.

Sebelumnya di media sosial ramai blokade di Jalan Raya Rungkut Manunggal, Surabaya yang berada di perumahan pondok tjandra indah pada Minggu, 5 April 2020. Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, M Fikser menuturkan, penutupan tersebut membuat warga juga protes dan minim sosialisasi. Namun, akses jalan itu sudah dibuka pada Senin 6 April 2020.

Fikser mengatakan, sebelum menutup jalan perlu kajian, diskusi oleh kepolisian, pemerintah Kota Surabaya dan lainnya. Hal ini agar ada pola sehingga tidak mengganggu. "Harus ada pola menutup, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi masyarakat tidak melakukan penutupan sepihak," ujarnya.

Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 ada sejumlah kriteria daerah mana saja yang bisa mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kriteria tersebut prasyarat diberlakukannya PSBB adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. (ard)

TANGANI COVID-19

TENAGA MEDIS DI JATIM CURHAT KE GUBERNUR KHOFIFAH



Gubernur Khofifah saat melakukan video conference bersama tim medis di Jatim

Surabaya- Tenaga medis sebagai garda terdepan dalam perang melawan wabah corona mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Bahkan melalui video conference mereka mencurahkan isi hati (curhat) mengenai kendala-kendala di lapangan.

Dalam video conference tersebut, Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini menunjukkan kepeduliannya dengan bertanya mengenai kondisi kesehatan dan nutrisi para tenaga medis selama menangani Covid-19. Termasuk, kendala-kendala secara khusus yang dihadapi para tenaga medis, dan juga terkait gizi yang diberikan saat bertugas.

"Assalamualaikum. Saya bersama Pak Wagub, Pak Sekda dan Pimpinan RSUD dr Soetomo. Boleh kami dapat informasi kondisinya rekan-rekan medis di lapangan? Apa kendala-kendala secara khusus yang dihadapi oleh para dokter dan tenaga medik lainnya di sana ketika melayani pasien Covid-19. Tingkat

kesulitannya, tingkat sensitivitasnya," sapa gubernur perempuan pertama di Jatim ini, Minggu (5/4) malam.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menanyakan waktu istirahat yang dimiliki para dokter, dan perawat selama proses pelayanan berlangsung. Bahkan, dirinya juga meminta rekomendasi dari tim medis dan paramedik terkait waktu ideal untuk istirahat dalam rangka menjaga stabilitas mereka.

"Untuk bisa menjaga stabilitas kita berapa hari atau berapa minggu bertugas, berapa hari atau berapa minggu istirahat? Adakah sirkulasi waktu jaga? Ini penting, agar tetap ada keseimbangan antara waktu bertugas dan istirahat," imbuhnya.

Di akhir video conference, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para petugas medis, paramedis maupun frontliner atas penanganan yang diberikan pada kasus Covid-19. Utamanya, Gubernur mengirim salam bagi para pasien positif Covid-19 dan menitip pesan kepada para pasien agar terus semangat menghadapi ini dan yakin bahwa pemerintah selalu ada bersama mereka serta para tim medis siap memberikan pelayanan terbaik buat para pasien Covid-19.

Sementara itu, salah satu peserta video conference tersebut, Dokter Spesialis Paru RSUD dr Soetomo, dr Wahyu mengatakan, dirinya saat ini bertugas menjadi Tim Penere di RSUD dr Soetomo Surabaya. Ia telah merawat 10 pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, dan 3 di antaranya menggunakan ventilator.

"Kemudian yang pulang hari ini ada empat orang. Ada tiga orang yang kondisinya stabil, satu orang sudah konversi negatif. Jadi, kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi, nanti pasien akan melakukan isolasi diri di rumah. Tetap kita pantau bersama rekan-rekan kita," ujarnya.

Mengenai waktu istirahat, Wahyu menjelaskan, masih bisa terkendali. Saat ini, dalam setiap pelayanan pihaknya disupport dengan dua orang PPDS Paru, PPDS Anastes dan lima perawat yang bertugas.

"Jadi begini bu karena kita sudah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi. Tetap kita pantau teman-teman, apakah ada keluhan atau tidak. Kalau memang ada keluhan akan ada pemeriksaan. Minimal untuk screening. Untuk jam kerjanya satu minggu kalau bisa ada penggantinya, karena memang cukup," jelas Wahyu. (ist)

DPRD SURABAYA: RESTRUKTURISASI APBD UNTUK CORONA **SEMENTARA RP 196 M**

Surabaya – Wabah corona mendorong berbagai pihak untuk secepat mungkin mengatur strategi penanganannya. DPRD Kota Surabaya pun menggelar rapat teleconference dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang diikuti juga oleh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya, Jatim, Senin (6/4).

"Rapat berlangsung lancar, mulai awal sampai akhir," kata Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutawidjono usai rapat.

Adi mengatakan Wali Kota Tri Rismaharini memaparkan restrukturisasi anggaran dari APBD Surabaya murni tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2020 untuk penanganan COVID-19.

"Besarnya sementara ini Rp196 miliar. Sebesar Rp160 miliar untuk pemberian sembako, kebutuhan makanan, bagi keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) selama 2 bulan. Angka ini bisa bergerak dinamis, karena pemerintah pusat juga memberikan kebijakan jaring pengaman sosial," kata Adi.

Selain soal anggaran, lanjut dia, DPRD juga menyimak paparan Wali Kota Risma tentang kebijakan lain tentang pencegahan COVID-19, antara lain penyemprotan disinfektan ke pemukiman penduduk, pem-

buatan bilik disinfektan di kantor-kantor publik, wastafel di tempat-tempat umum.

"Juga pemberian APD (alat pelindung diri) ke-14 rumah sakit di Surabaya, yang menjadi rujukan penanganan COVID-19. Tidak hanya RSUD dr. Soewandhi dan RSUD Bakti Dharma Husada yang dikelola Pemkot Surabaya," ujarnya.

Diketahui rapat teleconference yang digelar di Ruang Rapat Parupurna DPRD Surabaya itu diikuti Ketua DPRD Adi Sutawidjono dan tiga wakil ketua DPRD yakni Laila Mufidah, A.H.Thony dan Reni Astuti. Sedangkan anggota DPRD lainnya di ruang kerja pribadi di Gedung DPRD yang baru.

Sementara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Sekretaris Daerah Hendro Gunawan serta para asisten dan pimpinan OPD Pemkot Surabaya melakukan rapat teleconference di halaman Balai Kota Surabaya.

Dalam rapat teleconference, DPRD Kota Surabaya memberi masukan dan pandangan kepada Wali Kota Tri Rismaharini dan jajaran Pemkot Surabaya. "Saya dan beberapa anggota dewan, juga menyampaikan kepada bu wali kota tentang keberatan masyarakat Babat Jerawat, khususnya Pondok Benowo Indah. Yang menolak Rumah Susun yang belum ditempati bakal dijadikan tempat



DPRD Surabaya rapat via daring dengan Walikota Tri Rismaharini terkait wabah corona

isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP)," kata Adi.

Ia menegaskan DPRD mendukung penuh langkah-langkah Wali Kota Risma dan Pemkot Surabaya dengan saling bersinergi dan mendukung. "DPRD memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dikerjakan dan akan dilakukan Wali Kota Bu Risma dan semua jajaran pemkot akibat wabah covid-19. Ini membutuhkan penanganan yang kompak, agar situasinya cepat mereda, dan kehidupan kembali normal," kata Adi.

Adi mengatakan, DPRD Kota Surabaya berkomitmen tetap bekerja, dalam situasi sulit sekalipun. "Untuk mendalami materi-materi yang tadi dipaparkan Bu Risma, maka setelah ini komisi-komisi bisa menggelar rapat dengan pemkot, sesuai dengan tupoksinya," katanya. (ard)

DPR DESAK BNPB BUKA PETA ZONA PENYEBARAN CORONA

Jakarta – Membuka data dan peta zona penyebaran wabah corona dinilai sangat penting. Selain agar pemerintah bisa lebih terarah dalam mengambil kebijakan sesuai kondisi riil di lapangan, masyarakat juga menjadi lebih serius mematuhi aturan.

Hal tersebut diungkapkan Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja (raker) dengan Kepala BNPB Doni Monardo. Komisi VIII juga ingin mengetahui ketersediaan anggaran, serta peralatan penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19).

"Peta atau zona penyebaran virus corona ini pak, karena kalau tidak, tidak bisa kita hambat semaksimal mungkin, maka imigrasi COVID-19 ini akan mengkhawatirkan sekali," sebut Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dalam rapat yang digelar secara virtual, Senin (6/4).

Yandri menyebut peta tersebut berguna supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan daerah yang penyebarannya harus dihambat lebih dulu.

"Kita ingin memastikan bahwa dampak sosial atau dampak yang lain yang langsung berpengaruh ke masyarakat perlu kita dengar. Saya yakin Pak Kepala BNPB mendapatkan info yang sangat komplrit dari Istana termasuk dengan kementerian

/lembaga yang lain," kata Yandri.

"Dan alat-alat yang ataupun kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengobati orang-orang yang sudah terpapar akan sudah terpenuhi atau belum," imbuhnya.

Komisi VIII, sebut Yandri, juga meminta agar sosialisasi mengenai bahaya virus Corona, maupun kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebarannya lebih digencarkan lagi. Sebab, menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui.

"Ini di dapil saya mereka tidak mengetahui dampak COVID-19. Kalau masyarakat tidak sadar, kalau tidak kita batasi, maka ini sangat mengkhawatirkan sekali. Maka itu kita ingin mengetahui bagaimana koordinasi Gugus Tugas dengan pemerintah daerah," tutur Yandri.

Akui Data Tak Sinkron

Sebelumnya, BNPB mengakui, Kemenkes tak terbuka menyampaikan data terkait kasus COVID-19 di Indonesia. Bahkan BNPB sendiri tak bisa mengakses data secara menyeluruh. "Betul masih banyak yang tertutup," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo dalam diskusi virtual yang diunggah akun Youtube Energy Academy Indonesia, Minggu (6/4).



Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto

"Saya juga baru tahu kalau Kementerian kesehatan itu tiap hari melaporkan data ke WHO itu nomor, jenis kelamin, umurnya, sama statusnya seperti apa. Baru tahu juga kalau ada data seperti itu," imbuhnya.

Maka dari itu, hingga kini BNPB merintis aplikasi Lawan Covid-19. Mereka akan meminta tenaga kerja dari BNPB, BPBD, TNI, dan Polri untuk memasukkan data dalam aplikasi tersebut. "Kami mendapat feeding dari Kemenkes memang terbatas datanya. Kami memang belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka. Itu memang salah satu kendala saat ini," tuturnya.

Selain itu, BNPB juga mengakui, data pemerintah pusat dari Kemenkes berbeda dengan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Untuk menyiasati itu, kata Agus, BNPB mengumpulkan data dari keduanya: Data terbatas dari Kemenkes dan pemerintah daerah. Dia juga menegaskan, keterbukaan data terkait COVID-19 itu sangat penting. Salah satunya agar tidak ada tindakan yang salah untuk merespon atau mengendalikan virus tersebut. (ist)

PEMKOT MALANG AJUKAN PSBB KE GUBERNUR JATIM

Malang- Pemerintah Kota Malang telah mengirim pengajuan surat persetujuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Rencananya, PSBB itu akan diterapkan dalam lingkup Malang Raya yaitu Kabupaten dan Kota Malang serta Kota Batu.

"Kami sudah mengirim pengajuan surat persetujuan PSBB ke Gubernur Jawa Timur," kata Wali Kota Malang, Sutiaji, Senin, (6/4).

Sutiaji mengatakan, pengetatan dilakukan karena pemerintah sedang berpacu melawan virus corona Covid-19. Apalagi wilayah Kota Malang masuk zona merah penyebaran virus corona di Jawa Timur. "Karena kita semua berpacu dengan waktu, berkejaran dengan gerak Covid-19 itu sendiri. Saya perlu ingatkan bahwa jangan hanya melihat angka PDP konfirmasi positif atau pun yang dirawat. Tapi coba kita cermati dan waspadai pula angka ODR, OTG maupun ODP yang terus merangkak naik," papar Sutiaji.

Sutiaji menyebut langkah ini diambil, sebab beberapa warga atau publik terkesan abai dengan situasi yang ada. Berdasarkan pantauan Pemkot Malang jalanan kota masih

ramai lalu lalang lalu lintas. Untuk itu, langkah pengetatan dilakukan terlebih aturan PSBB telah dikeluarkan oleh pemerintah.

"Kita sudah imbau tinggal di rumah, pelaku usaha atau pengusaha kuliner pun tidak kita perintah mutlak tutup. Tapi lakukan layanan dengan pesan antar. Itu semata untuk mereduksi kumpulan dan mobilitas orang di jalanan," tandasnya.

Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu telah bekerjasama dengan Universitas Brawijaya (UB), menyusun draf pemberlakuan PSBB. "Instrumennya kan harus ditata, apa-apa yang harus dilakukan. Drafnya dari UB, di sana sudah dibentuk tim," kata Sutiaji.

Rencananya, PSBB itu akan diterapkan dalam lingkup Malang Raya. Setiap akses menuju Malang Raya akan dipantau untuk membatasi mobilitas warga. "Kalau kesepakatan kemarin tiga daerah, dikunci di daerah perbatasan. Pergerakan orang nanti akan dipantau," katanya. Karena itu, ketiga pemerintah daerah itu harus bersinergi untuk membahas PSBB itu.

Sebab, pembatasan sosial berskala besar itu akan berpengaruh teradap perekonomian warga. "Kalau menutup pergerakan orang gampang, tapi imbas dari semua



Wali Kota Malang, Sutiaji

itu kan harus dipikirkan," jelasnya. "Kita punya orang yang bekerja di daerah Lumajang atau sebaliknya, di Blitar juga sebaliknya, di Pasuruan juga sebaliknya, di Kediri juga sebaliknya. Harus ada (skema perencanaan), bagaimana orang yang asalnya bekerja terus tidak bekerja," jelasnya.

Pemerintah daerah juga akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk berjaga di setiap perbatasan. Diketahui, Malang Raya berbatasan langsung dengan Pasuruan, Lumajang, Blitar, Kediri dan Mojokerto. "Teknisnya kerjasama dengan kepolisian," jelasnya. (ist)

UN DIHAPUS, INI 5 KRITERIA KELULUSAN SISWA SD DI BLITAR

Blitar - Karena Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2019-2020 ditiadakan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Blitar menentukan 5 kriteria kelulusan bagi siswa SD.

Disampaikan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kusnawati dengan adanya keputusan itu pihaknya telah merumuskan kriteria kelulusan bagi siswa SD. "Ada lima kriteria yang harus dipenuhi siswa, agar bisa lulus SD," tutur Kusnawati.

Mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar memastikan bahwa ujian sekolah jenjang SD tahun ajaran 2019/2020 ditiadakan.

Adapun kelima kriteria kelulusan tersebut diantaranya : menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, memiliki rata-rata nilai rapor semester 7 - 12 (kelas 4-6), mengikuti latihan Ujian Sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. "Terakhir kelulusan peserta didik, dari satuan pendidikan formal ditetapkan melalui rapat dewan guru oleh satuan pendidikan yang bersangkutan," ungkapny.



Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kusnawati

Sementara untuk siswa SD di Kota Blitar juga demikian, kelulusannya mengacu pada SE Mendikbud No 4 Tahun 2020 tersebut. "Karena memang UN untuk SD dihapuskan, maka kelulusan sesuai dengan acuan tersebut," kata Plt Kepala Dikda Kota Blitar, Priyo Suhartono.

Ditambahkan Priyo selain kelulusan SD dan SMP, penilaian kenaikan kelas pihaknya juga disampaikan pada seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP. "Pemberian nilai yang digunakan dalam kenaikan kelas dan ijazah, juga mengacu pada SE Mendikbud tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan US tidak hanya mengacu pada ujian tertulis, tetapi juga mencakup nilai rapor dan prestasi yang dimiliki siswa selama menempuh pendi-

dikan. Untuk ujian tertulis (daring), materi yang akan tertuang dalam US merupakan kewenangan guru yang bersangkutan. Sekolah kini berperan sebagai penentu kelulusan siswa dengan berdasarkan evaluasi yang dilakukan guru. Sehingga penguasaan materi sangat bergantung dari cara siswa dan guru dalam memaksimalkan pembelajaran daring selama situasi darurat. Siswa akan tetap menerima ijazah tanpa mencantumkan nilai UN, karena sejak tahun 2015 UN lagi menjadi penentu kelulusan.

Sekolah yang telah melaksanakan US dapat menggunakan nilai US untuk menentukan kelulusan siswa. Namun bagi sekolah yang belum melaksanakan US ada beberapa ketentuan. Kelulusan SD/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, 5, dan 6 semester gasal), sementara nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Kelulusan SMP/ sederajat atau SMA/ sederajat juga ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Sementara itu untuk kelulusan SMK/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Kemudian nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. (ais)

PEMKAB BLITAR BERDAYAKAN PULUHAN UKM PRODUKSI MASKER

Blitar - Dampak pandemi Virus Corona (Covid-19) tidak selalu negatif, bagi puluhan UKM di Kabupaten Blitar justru menjadi berkah. Sebab para penjahit, perajin pernak-pernik dan usaha lainnya binaan Dinas Koperasi dan UKM diberikan peluang untuk memproduksi masker kain.

Bupati Blitar, Rijanto menyampaikan kelangkaan dan mahalannya harga masker pabrikan di pasaran, mendorong masyarakat menggunakan masker kain sesuai anjuran pemerintah. "Nah, UKM Blitar bisa membuat masker kain yang tentu berfungsi untuk menghindari penularan corona," tutur Bupati Rijanto, Senin (6/4).

Dijelaskan Bupati Rijanto dengan membeli masker kain dari UKM lokal, selain mengurangi risiko penyebaran Covid-19 juga membantu menggerakkan roda ekonomi daerah. "Karena dampak ekonomi dari Covid-19, bagi UMKM di Kabupaten Blitar sangat besar," jelasnya.

Setelah mengunjungi beberapa UKM yang beralih bidang usaha dengan membuat masker, Bupati Rijanto berjanji ikut membantu memasarkan melalui ajakan dalam program Bela dan Beli Produk Blitar. "Seluruh ASN dan OPD saya imbau untuk



UKM di Blitar diarahkan menjadi produsen masker kain karena usaha aslinya terimbas wabah corona

membeli produk UKM lokal termasuk masker kain ini," tandasnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Ulfie Zulfiqar Zuqas mengatakan jika para UKM binaan dinas nya tersebut, beralih usaha karena dampak Covid-19. "Karena hasil produk asli atau usaha mereka tidak bisa terjual, maka kami dorong dengan adanya peluang usaha masker," ungkap Ulfie.

Sesuai data, dari sekitar 33 UKM yang tersebar di 17 kecamatan se Kabupaten

Blitar ini, diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah. "Karena ada himbauan dari pemerintah, semua yang keluar wajib menggunakan masker," terangnya.

Ditambahkan Ulfie, hasil produksi masker kain dari UKM ini selain melayani kebutuhan lokal, juga mulai menerima pesanan dari luar daerah. "Untuk memudahkan pembeli, langsung kami cantumkan no kontak UKM agar bisa langsung bertransaksi," pungkasnya. (ais)

WABAH CORONA

RUMAH DINAS WALIKOTA MADIUN JADI POSKO SEMBAKO

Madiun-Kebijakan social distancing akibat wabah corona mulai mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun langsung mendirikan posko sembako di rumah dinas walikota, Jalan Pahlawan, Kota Madiun.

"Posko sembako yang berada di halaman depan rumah dinas walikota ini digunakan untuk mengumpulkan paket-paket bahan makanan sebelum dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kami sudah memprogramkan. Khususnya, bagi pekerja sektor informal dan PKL yang tidak mendapatkan bantuan dari PKH, BPNT, maupun BPNTD. Juga, mereka yang ada di luar itu," tutur Walikota Madiun Madi saat ditemui sedang meninjau Posko Sembako, Senin (6/4).

Terkait pendistribusian, walikota menuturkan, pihaknya masih menunggu proses pendataan di lapangan selesai. Setelah itu, seluruh paket akan dikirimkan door to door ke rumah warga. "Pembagian secara serentak supaya adil," imbuhnya.

Sementara itu, bagi donatur yang ingin menyumbangkan bantuan masih diterima. Penyalurannya melalui Posko Sembako yang telah tersedia di halaman rumah dinas walikota. "Koordinatornya dari BPBD. Tim

sudah kami siagakan semuanya," tandasnya.

Penataan Jam Kerja

Selain itu, Pemkot Madiun juga mengeluarkan Surat Edaran Walikota untuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penyesuaian sistem kerja pegawai. Perusahaan dihimbau mengatur sistem kerja karyawan yang berdomisili di luar Kota Madiun untuk bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH). Sedang, karyawan yang bertempat tinggal di dalam kota dengan sistem shift atau bergiliran.

"Sistem ini berlaku untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Madiun sejak beberapa waktu lalu. Saya ingin mempertegas untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD. Karena setelah kita amati, masih banyak warga luar kota yang keluar-masuk Kota Madiun," kata walikota, Senin (6/4).

Perusahaan, kata walikota, harus memperlakukan sistem kerja baru bagi karyawannya selama masa percepatan penanggulangan Covid-19 ini. Karyawan dari luar kota tidak harus ngantor. Namun, dapat diberikan pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah. Karyawan yang masuk kantor hanya mereka yang bertempat tinggal di dalam Kota Madiun. Pun, itu harus diberlakukan shift agar pekerjaan tetap



Posko sembako didirikan di rumah dinas Walikota Madiun

dapat tertangani maksimal.

"Kota kita tidak lockdown. Perusahaan tetap harus berjalan. Hanya sistem bekerjanya sedikit diubah. Ini sesuai instruksi pemerintah pusat," jelasnya.

Walikota memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan untuk mengatur sistem kerja pegawainya dengan mengacu dua poin tersebut. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkannya SE Walikota nomor 443.32/1168/401.201/2020 tertanggal 2 April kemarin. Surat tersebut mengacu SE Walikota sebelumnya terkait perpanjangan peningkatan kewaspadaan Covid-19 yang dikeluarkan 30 Maret lalu.

"Sampai saat ini kota kita masih zero Korona. Tetapi daerah-daerah sekitar sudah ditemukan adanya positif Korona. Karena, kita perlu mengambil kebijakan ini agar kota kita tetap steril," pungkasnya. (sur)

Anindya
Kusuma
Putri



Pengalaman adalah guru terbaik. Pepatah ini sesuai dengan perjalanan yang dialami Anindya Kusuma Putri (28).

Puteri Indonesia 2015 ini mengungkapkan, apa yang diperolehnya kini tidak melalui jalan mulus. Ia juga pernah berhadapan dengan stress dan ketakutan,

“Pernah sampai ngunci diri di kamar saking stress. Bahkan insecure hanya untuk unggah foto di Instagram.

“Setiap detailnya diperhatikan. Senyumnya sudah pas belum. Gayanya sudah sesuai belum. Sampai segitunya karena sejak menang Puteri Indonesia, hidupku berubah,” ujar Anindya, seperti dikutip Koran Kompas.

Rasa tak aman itu terjadi karena ia mempertimbangkan respons. Saat itu, ibundanya yang berada di Semarang menjadi obat dan penyemangatnya untuk bangkit.

Berbagai komentar negatif kustru menjadi cambuk bagi gadis yang pernah masuk dalam 15 besar ajang Miss Universe 2015 ini.

“Jadi titik balik untuk terus mengembangkan diri. Apa yang kurang terus aku asah,” ujar perempuan yang kini juga menjadi CEO Jetski Safari Indonesia ini.

Perjalanannya untuk bangkit dibagikan juga saat terlibat dalam Festival Virtual Talk #dirumahaja yang digagas Indonesia Next Leader.

Anindya muncul dalam sesi pertama dengan tajuk “Rise from Failure & Enjoy the Process”. Ia pun berminat ikut serta karena ada pesan positif bagi generasi muda yang diusung dari kegiatan ini.

Selain itu ia juga ingin membantu penanganan Covid-19 dengan mengisi waktu di rumah saja.

“Dalam sesi tadi, aku ingin mengajak orang-orang melihat sisi itu. Bahwa bisa sukses itu lewat proses dan perjuangan serta ada kegagalan yang dialami. Karena itu perlu belajar dari kegagalan,” tutur Anindya.

Anindya lahir di Semarang pada tanggal 3 Februari 1992. Sebelum

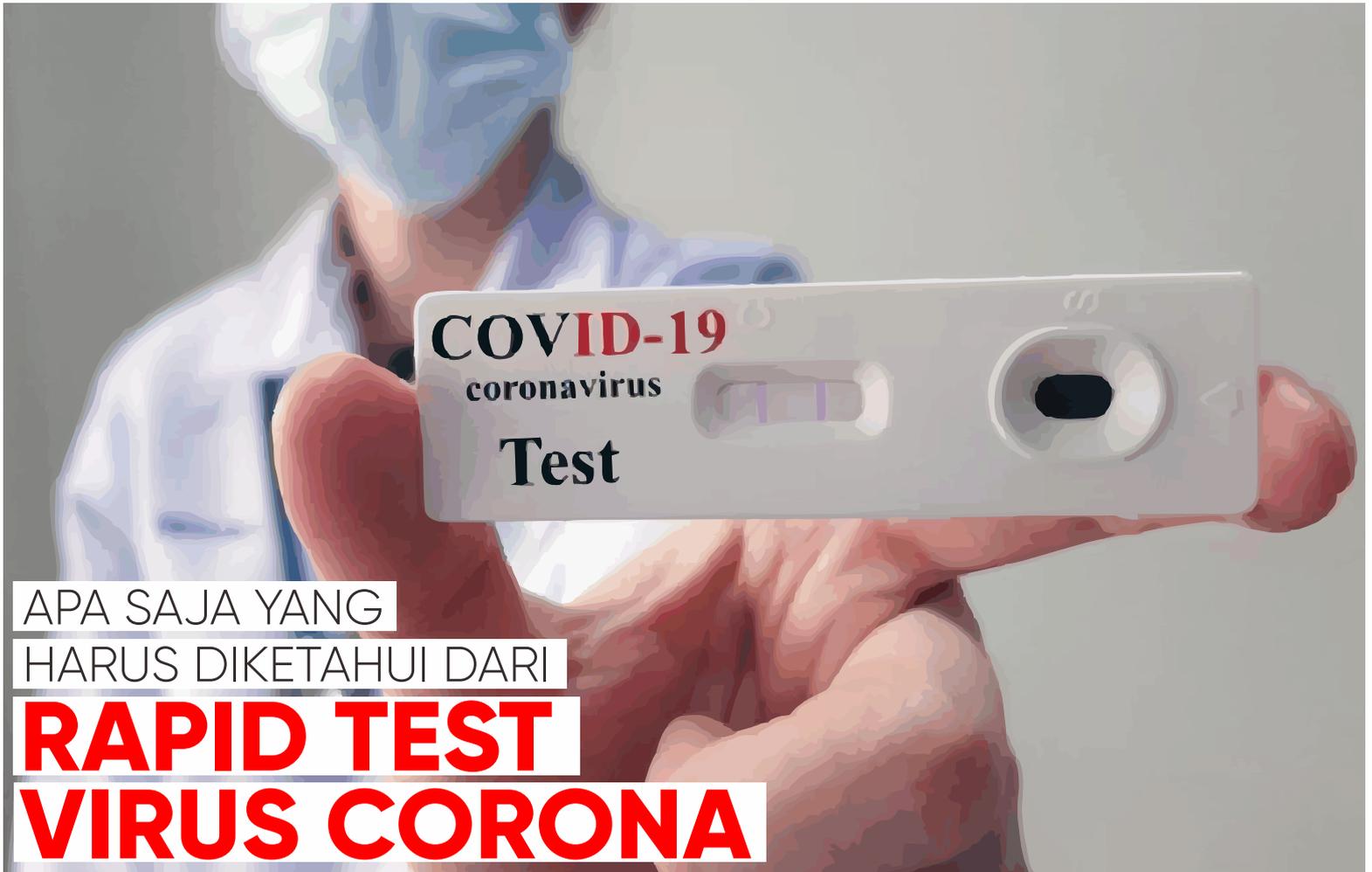
menjadi Puteri Indonesia, Anindya pernah menjuarai kontes Gadis Sampul 2008. Anin adalah alumnus SMA Negeri 1 Semarang kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Semasa berkuliah, ia aktif di organisasi mahasiswa AIESEC menjabat sebagai Presiden local committee Universitas Diponegoro dan pernah mengikuti program konferensi internasional mahasiswa di sejumlah negara.

Kini ia telah menyelesaikan studinya di Universitas Diponegoro dengan gelar Sarjana Teknik.

Selain aktif di dunia model, dia juga pernah terjun ke dunia hiburan dengan membawakan acara Jejak Petualang di stasiun TV Trans 7 dan My Trip My Adventure di stasiun TV TransTV serta bermain film Kukejar Cinta ke Negeri Cina pada tahun 2014.

Anindya yang hobi olahraga juga mengantarkannya menjadi juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mulai awal Mei 2017 (Ist).





APA SAJA YANG HARUS DIKETAHUI DARI RAPID TEST VIRUS CORONA

Batuk sedikit, langsung berpikir terinfeksi virus corona. Tenggorokan sakit, pikiran langsung ke ruang isolasi. Jangan-jangan kita positif, tapi kita tidak tahu. Duh, jadi takut berlebihan.

Tapi memang ini yang bikin kita cemas, bagaimana kita tahu kalau batuk atau sakit tenggorokan yang kita derita adalah salah satu tanda dari infeksi virus corona?

Tentu semua kepastian itu baru bisa kita dapatkan setelah kita melakukan pemeriksaan secara medis, salah satunya, dengan rapid test virus corona yang dilaksanakan secara massal di Indonesia.

Achmad Yuriyanto, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, mengatakan jika rapid test ini akan menggunakan spesimen darah dan bukan tenggorokan atau kerongkongan seperti tes corona sebelumnya.

Metode rapid test ini diklaim memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi untuk mengidentifikasi virus Covid-19 yang terdapat pada tubuh manusia.

Berdasarkan penelitian, rapid test dapat bekerja jauh lebih cepat hanya dalam kurun waktu 30 menit dibandingkan tes sebelumnya yang membutuhkan waktu 90 sampai 120 menit.

Meski begitu, rapid test disebut membutuhkan reaksi dari imunoglobulin pasien

yang terinfeksi virus corona, paling tidak dalam waktu satu minggu.

Bukan tanpa sebab, jika pasien belum terinfeksi atau sudah terinfeksi tapi kurang dari seminggu, maka ada kemungkinan hasil dari imunogloblinnya menjadi negatif.

Menurut Prof. DR. Dr. Aryati, MS, Sp.PK(K), Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKln), dalam rapid test bisa jadi hasil tidak sesuai.

Ada potensi memunculkan hasil negatif palsu dan positif palsu. Ibaratnya dikira negatif dan tidak sakit, namun belum tentu.

Bisa saja dia terpapar namun belum terlihat oleh antibodi yang timbul. Sehingga harusnya dilakukan pengawasan atau karantina pada orang tersebut.

"Tapi kalau hasilnya negatif dia belum melewati inkubasinya, saya sarankan untuk dilakukan pengambilan sampel ulang 7 hari kemudian dari hari pertama tadi. Misal batuk, diperiksa negatif, jangan senang



Tes Polymerase Chain Reaction (PCR)

dulu. Cek lagi hari ke-12. Kalau dicek lagi positif, berarti, ya, positif," ujar Aryati

Menurut Aryati, jika hasil rapid test menunjukkan positif, maka hasil tersebut akan dikonfirmasi kembali dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk menguatkan analisa.

Meski pemeriksaan ini baik dilakukan, nyatanya tak semua orang bisa ikut diperiksa dengan metode rapid test ini.

Hanya mereka yang ditandai punya risiko dan potensi tertular atau menularkan tinggi saja yang diperkenankan untuk mengikuti tes.

Sampai saat ini provinsi Jawa Barat yang sudah resmi mengumumkan menjalankan prosedur rapid test ini (Ist).



TRAFIK APLIKASI MEDSOS NAIK 40 PERSEN — SAAT COVID-19 —

Penggunaan media sosial kian meningkat, seiring dengan imbauan para pengguna di seluruh dunia untuk tetap berada di rumah guna menghindari peredaran Covid-19..

Salah satu platform yang trafiknya melonjak karena dampak Covid-19 adalah WhatsApp. Trafik WhatsApp secara global dilaporkan meningkat 40 persen saat masyarakat disarankan untuk tinggal di rumah ketimbang hari biasanya.

Pemerintah Indonesia lewat Kemkominfo telah menggandeng aplikasi olah pesan WhatsApp untuk mengembangkan chatbot yang berfokus pada isu Covid-19 di Indonesia.

Di lingkup global, WhatsApp juga berkolaborasi dengan organisasi kesehatan dunia (World Health Organisation, WHO) mengembangkan chatbot serupa.

Mengutip laman Tech Crunch, Sabtu (28/3/2020), berdasarkan survei ke-

pada lebih dari 25.000 konsumen di 30 negara yang dilakukan 14-24 Maret 2020, WhatsApp merupakan aplikasi yang trafik-nya melonjak drastis gara-gara Covid-19.

Secara keseluruhan, berdasarkan survei, WhatsApp mengalami peningkatan 40 persen. Saat hari-hari awal pandemic CVoid-19, penggunaannya meningkat 27 persen, sementara kini trafik-nya naik 41 persen.

Tidak hanya itu, untuk negara-negara yang sudah dalam fase pandemik, penggunaan WhatsApp melonjak hingga 51 persen.

Trafik Per Negara Meningkat

Di tiap-tiap negara, penggunaan WhatsApp pun melesat ketimbang biasanya. Misalnya di Spanyol, penggunaan WhatsApp di Spanyol meningkat hingga 76 persen.

Tidak hanya WhatsApp, sebenarnya platform pesan lain pun penggunaannya juga meningkat akibat Covid-19, di mana peng-

gunaan paling banyak dilakukan oleh usia 18-37 tahun.

WhatsApp, Facebook, dan Instagram mengalami lonjakan trafik hingga lebih dari 40 persen.

Trafik Aplikasi Medsos Lain Ikut Naik

Sementara, aplikasi lainnya yang juga meningkat trafik-nya adalah WeChat dan Weibo.

Secara keseluruhan, penggunaan Facebook meningkat hingga 37 persen dan penggunaan WeChat serta Weibo meningkat 58 persen.

Meski begitu, tantangan dari informasi yang tersebar di media sosial adalah masalah platform yang bisa dipercaya atau tidak ketimbang dengan situs berita atau website organisasi kesehatan resmi.

Responden menilai, situs berita 48 persen lebih dipercaya. Sementara, hanya 11 persen responden yang menganggap platform media sosial dapat dipercaya (Ist).

LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PENANGGUNG JAWAB TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO : Jakarta : Hariris Shofa | Surabaya : AGUSTINA WIDYAWATI, LUTFI YUHANDI, TARMUJI TALMACSI (ID Sertifikasi 16216) , JUNAIDI (ID Sertifikasi 4175), IMAN GHOZALI (ID Sertifikasi 11563),
ARDINI PRAMITHA, | Malang Raya-Batu: EKA NURCAHYO (ID Sertifikasi 4686), MOH.AMRULLAH, | Sidoarjo: M JAINUL ARIFIN, | Gresik : ASEPTA YOGA P (ID Sertifikasi 3189)
Pasuruan-Probolinggo : ARIE YOENANTO (ID Sertifikasi 8372) | Bondowoso-Situbondo-Lumajang-Jember-Banyuwangi: IMAN SANTOSO, | Blitar-Tulungagung-Trenggalek : ARIEF SUKAPUTRA ,
Kediri-Nganjuk-Jombang : GATOT SUNARKO, | Madiun-Ponorogo : RACHMAD SURYADI, | Mojokerto: WISNU JOEDHA

DIREKTUR BISNIS DAN KOMERSIAL SUPARTI, SH, MM MANAGER HRD SUHARDIMAN EKO PRASETYO
PENASEHAT HUKUM Dr. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH MARKETING COMMUNICATION DJOKO PRASETYO SEKRETARIS ISTIDHA NUR AMANAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN SEPTIANUS DAKOSTA, KIKI AMALIA GUYEN
ALAMAT REDAKSI JL. RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, TELP 03187854491 PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA
ALAMAT BIRO MALANG JL. KEBALEN WETAN 1040 B MALANG ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA, JL.RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA
REDAKSI 031-87854491 IKLAN 031-87854491 NIB 91205006801134 HARGA IKLAN RP 10.000/ MM/ KOLOM.



Mudah Berkeringat?

Produk Ini Wajib Dikoleksi

Kamu mudah berkeringat? Tak cuma gerah dan kurang nyaman, tapi kondisi ini seringkali membuat minder. Nah, ada beberapa produk kecantikan yang wajib kamu miliki dengan kondisi tubuh seperti itu.

Tubuh seseorang memang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih tahan dengan iklim tropis yang dimiliki Indonesia, tapi ada juga mereka yang mudah berkeringat karena kepanasan.

Nah, mereka yang cepat berkeringat tentu saja harus mengaplikasikan produk kecantikan yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Seperti dilansir dari PureWow, berikut produk kecantikan yang harus dipilih, jika kamu adalah orang yang cepat berkeringat.

1. Dry shampoo

Keringat berlebih menyebabkan kulit kepala lebih cepat berminyak. Apalagi jika kamu lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Kotoran, debu, dan angin kian membuat rambut menjadi lepek. Karena itu, bawalah selalu dry shampoo dalam tas kamu untuk membuat rambut selalu terlihat segar.

5. Make-up waterproof

Lantaran rentan alami berkeringat dan berminyak, pastikan menggunakan produk make-up jenis waterproof. Dengan begitu, riasan wajah kamu akan tetap tahan sepanjang hari meski berkeringat sekali pun. (Ist)

2. Lip stain

Dibandingkan lipstik atau lip gloss, gunakan lip stain yang bisa memberikan ketahanan warna yang lebih lama. Penggunaan lip gloss bisa membuat tampilan kamu terlihat semakin berminyak pada saat berkeringat.

3. Setting spray

Cuaca yang super panas bisa membuat make-up wajah kamu menjadi rusak meski kamu sudah menggunakan jenis waterproof sekali pun. Solusinya, semprotkan setting spray atau face mist untuk membuat wajah segar dan make-up tahan lama.

4. Kertas minyak

Produk wajib lainnya yang harus ada dalam tas adalah kertas minyak. Ya, saat minyak mulai muncul pada kulit wajah, tepuk-tepuikkan kertas minyak untuk menghilangkannya.



Orang Tanpa (dari hal 1)

Berbagai negara mulai memasuki gelombang baru wabah corona termasuk Indonesia. Penularan virus Covid-19 diramalkan akan semakin massif karena kini makin banyak kasus positif tanpa menunjukkan gejala-gejala pada umumnya.

Juru bicara pemerintah Indonesia soal penanganan corona, Achmad Yurianto, lagi-lagi menekankan pentingnya physical distancing untuk memutus mata rantai penularan corona. "Hati hati ini kadang-kadang kalau kita bisa saja sekarang gambaran yang terbanyak hampir sekitar di atas 60% atau ada yang mengatakan sampai 70 persen penderita positif covid 19 ini tanpa gejala atau kita sudah mengenal dengan sebutan OTG atau orang tanpa gejala," kata Yurianto di Gedung BNPB, Senin, (6/4).

Ia menjelaskan, mereka paling berpotensi menyebabkan penularan. Sebab, kriteria orang sakit di berbagai daerah itu berbeda. "Dia bisa saja kemudian merasa tidak sakit karena tanpa gangguan, bahkan dengan gangguan yang minimal kadang-kadang persepsi sakit itu kan beda ya. Kalau di kampung saya namanya sakit itu kalau sudah enggak bisa nyangkul di sawah itu baru dibilang sakit," urai dia.

Menurut data kasus positif virus corona hingga Senin (6/4) pukul 12.00 WIB sudah mencapai 2.491 orang. "Yang kita terima pada pencatatan hari ini kita dapatkan penambahan kasus baru konfirmasi COVID-19 dari pemeriksaan menggunakan PCR, bukan pemeriksaan rapid test sebanyak 218 kasus baru jadi 2.491," ujarnya.

Sementara korban meninggal dunia akibat virus corona juga kembali meningkat, dari sebelumnya 198 jiwa kini menembus 209 orang. Akan tetapi, pasien yang dinyatakan telah sembuh COVID-19 juga bertambah dan kini menjadi 192. Angka ini bertambah dari sebelumnya 164 orang.

"Sembuh (bertambah) 28 orang, total menjadi 192 orang. Dan ada pertambahan yang meninggal 11 orang sehingga total 209 (jiwa)," jelas Yuri.

Terkait penggunaan masker, selain membeli ditegaskannya masyarakat bisa membuat sendiri masker dari bahan

kain. Yuri mengatakan masker kain maksimal digunakan selama 4 jam. Masker dapat digunakan kembali setelah dicuci bersih menggunakan sabun. "Kita gunakan maksimal 4 jam dalam sehari, dan kemudian kita cuci kembali dengan air sabun," kata Yuri.

Yuri menambahkan masker bedah dan masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Dia meminta masyarakat tidak membeli dan menggunakan masker yang peruntukannya buat paramedis.

Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo memaparkan pemodelan yang dibuat oleh Badan Intelijen Negara (BIN) terkait COVID-19. Estimasinya, puncak jumlah kasus terjadi pada Mei. "Mudah-mudahan ini tidak menimbulkan kekhawatiran kita," kata Doni dalam rapat virtual bersama komisi VIII DPR RI, Senin (6/3).

Hingga akhir Maret 2020, BIN memprediksi akan ada 1.577 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Realitasnya, saat itu ada 1.528 kasus. Dalam hal ini, menurut Doni, tingkat akurasi prediksi BIN adalah 99 persen. "Pemodelan ini akan bisa kita kurangi bahkan lebih dari 50 persen manakala kita memiliki disiplin social distancing maupun physical distancing," tuturnya. Sedangkan estimasi kasus positif Corona pada tiap akhir bulan berikutnya: April sebesar 27.307; Mei 95.451; Juni 105.765; dan Juli 106.287 kasus. "Sebanyak 48 persen, risiko itu berada di Pulau Jawa," ucapnya. Selain itu, satu hal yang menjadi catatan BIN ialah kemampuan rapid test atau tes cepat yang masih belum maksimal.

Obat Pencegah Covid-19

Sementara itu, secercah harapan datang dari tim internasional yang dipimpin oleh peneliti dari University of British Columbia Dr Josef Penninger menemukan obat percobaan yang dipercaya bisa secara efektif memblok SARS-CoV-2 -- nama lain virus corona -- untuk menginfeksi inang. Penemuan ini dipublikasikan di Cell, 2 April 2020.

Pengobatan ini dipercaya bisa mengatasi infeksi awal virus corona, dan menurut data per 2 April ini sudah menunjukkan efek positif kepada lebih dari 981 ribu orang.

"Kami berharap hasil kami memiliki

implikasi untuk pengembangan obat baru guna pengobatan pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini," kata Penninger, profesor fakultas kedokteran UBC, direktur Life Sciences Institute dan Canada 150 Research Chair in Functional Genetics di UBC.

Ia menambahkan, pekerjaan ini adalah hasil dari kolaborasi antara peneliti dan perusahaan akademis, termasuk kelompok gastrointestinal Dr Ryan Conder dari STEM CELL Technologies di Vancouver, Nuria Montserrat asal Spanyol, Drs Haibo Zhang dan Art Slutsky dari Toronto, serta tim biologi infeksius Ali Mirazimi di Swedia.

"Tim telah bekerja tanpa kenal lelah siang dan malam selama berminggu-minggu untuk lebih memahami patologi penyakit ini dan untuk memberikan terobosan pilihan terapi," ucapnya. Demikian dikutip dari Eurekalert.

Terpisah, untuk di Indonesia, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan obat dan vaksin virus Corona menjadi rencana jangka panjang yang dikaji Tim Konsorsium COVID-19. Bambang mengatakan proses pengembangan vaksin pun akan memakan waktu minimal satu tahun.

"Bagaimana soal obat dan vaksin. Ini memang jangka menengah panjang. Untuk vaksin misalkan ini dibutuhkan waktu kira-kira waktu paling tidak saat ini minimal satu tahun, kecuali barangkali ada vaksin yang dikembangkan di luar yang kemudian bisa diproduksi di Indonesia," kata Bambang dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Senin (6/4).

Bambang mengatakan Tim Konsorsium COVID-19 sedang berupaya mengembangkan suplemen dari berbagai tanaman Indonesia. Dia mengatakan tim tersebut juga berupaya mengkaji obat bagi pasien penderita COVID-19. Salah satu obat yang sedang dikaji adalah pil kina.

"Salah satu yang sedang diuji sebagai obat untuk COVID-19 adalah pil kina. Karena pil kina ini memiliki kesamaan dengan yang sudah diberitakan media yaitu klorokuin. Mudah-mudahan dari pengujian ini ada sesuatu yang barangkali nanti bisa berkontribusi pada pengobatan COVID-19 itu sendiri," kata Bambang. (ist,ins)

APBN TEKOR Rp 853 T GARA-GARA CORONA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara akan mengalami penurunan drastis akibat virus corona (COVID-19) yang terjadi di Indonesia. Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR, Sri Mulyani menyebut outlook pendapatan negara turun menjadi Rp 1.760,9 triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun.

"Pendapatan negara, kami perkirakan minus 10%, berarti penerimaan hanya 78,9% dari target," kata Sri Mulyani saat raker virtual, Jakarta, Senin (6/4).

Pendapatan yang turun ini berbanding terbalik dengan belanja negara, kata Sri Mulyani outlooknya mengalami kenaikan menjadi Rp 2.613,8 triliun dari APBN sebesar Rp 2.540,4 triliun.

"Dari sisi belanja ini untuk memberikan perlindungan sosial akibat langkah WFH, sosial distancing dan pembatasan mobilitas yang membutuhkan jaminan sosial, juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan kebutuhan untuk melindungi dunia usaha dalam bentuk pajak," jelasnya.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara tersebut, Sri Mulyani menyebut berdampak pada defisit atau tekor APBN menjadi Rp 853 triliun atau 5,07% dari PDB. Angka defisit naik drastis dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari PDB

"Ini adalah outlook basisnya skenario asumsi yang kita kembangkan, setiap minggu kami akan update APBN yang mungkin bergerak dan berubah, tapi kami jelaskan basis penerimaan," ungkap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Dana Dari Utang

Ia mengatakan peningkatan pembiayaan ini terjadi baik yang bersumber dari utang maupun pos di luar utang. "Pembiayaan akan jadi sangat menantang. Pembiayaan akan meningkat sangat besar. Totalnya Rp 545,7 triliun terdiri dari pembiayaan utang Rp654,5 triliun dan non-utang minus Rp108,9 triliun," ucapnya.

Adapun merujuk pada APBN 2020 total pembiayaan berada di kisaran Rp351,9 triliun dari kategori utang. Lalu ada juga pembiayaan investasi minus Rp74,2 triliun berikut pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya. Alhasil total pembiayaan APBN 2020 berada di kisaran Rp307,2 triliun.

Perluasan pembiayaan ini kata Sri



Menteri Keuangan Sri Mulyani

Mulyani terkait dengan perluasan defisit anggaran yang kini diperkirakan bisa mencapai 5,07 persen. Melalui perluasan defisit itu, pemerintah bisa menambah belanja senilai Rp405,1 triliun dan sekaligus mengantisipasi penurunan penerimaan yang mencapai 10 persen.

Rinciannya, Sri Mulyani akan menysasar anggaran non utang terlebih dahulu seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL), dana abadi yang sudah disediakan pemerintah, sampai dana yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU). "Pembiayaan ini akan kami upayakan dapat financing dari sumber yang paling aman duluan dan tingkat biaya paling kecil," ucap Sri Mulyani.

Meski demikian Sri Mulyani membenarkan juga kalau dana dari pos-pos itu tidak akan cukup. Alhasil pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) tidak terelakan. Ia bilang pemerintah akan menggunakan semua lini kredit yang tersedia baik itu multilateral atau bilateral seperti dari Asian Development Bank (ADB). Lalu ada juga opsi sesuai Perppu No 1 Tahun 2020 yang membolehkan Bank Indonesia menjadi pembeli SBN di pasar primer. "Dalam kondisi pasar global volatile kami berikhtiar mencari kesempatan terbaik

agar mendapat biaya dan harga terbaik bagi SBN," ucap Sri Mulyani.

Dalam skenarionya, Sri Mulyani mencatat selama Q1 2020 ekonomi masih tumbuh di kisaran 4,7 persen. Lalu melambat di Q2 menjadi 1,1 persen dan 1,3 persen di Q3. Per Q4 pertumbuhan ekonomi diperkirakan pulih di kisaran 2,4 persen. (ist,ins)

OUTLOOK EKONOMI INDONESIA AKIBAT CORONA

1. Pendapatan negara turun menjadi Rp 1.760,9 T dari target APBN 2020 sebesar Rp 2.233,2 T
2. Belanja negara naik menjadi Rp 2.613,8 triliun dari APBN sebesar Rp 2.540,4 T
3. Defisit atau tekor APBN menjadi Rp 853 T atau 5,07% dari PDB.
4. Pembiayaan totalnya Rp 545,7 triliun terdiri dari :
 - Pembiayaan utang Rp654,5 T
 - Non-utang minus Rp108,9 T